

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah habis dibicarakan di Negara-negara di dunia terutama Negara yang sedang berkembang pun termasuk didalamnya Indonesia. Kemiskinan di Indonesia suatu fenomena yang terus ada sejak sebelum dan sesudah Indonesia merdeka hingga saat ini. Kemiskinan adalah persoalan yang dapat diatasi dengan adanya program yang tepat. Kemiskinan sebagai masalah sosial ekonomi telah mendorong banyak kegiatan penelitian yang dilakukan berbagai pihak seperti para perencana kebijakan publik, ilmuwan, dan masyarakat umum atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari berbagai latar pendidikan ilmu yang berbeda. Sebagai dasar untuk kebijakan pengentasannya, memahami masalah kemiskinan seringkali menuntut adanya upaya pendefinisian, pengukuran, dan pengidentifikasian akar-akar penyebab kemiskinan. Sebenarnya, berbagai kajian yang ditujukan untuk mengklasifikasi kemiskinan dan menganalisis penyebabnya telah banyak dilakukan. Namun, upaya-upaya tersebut belum tuntas, karena kemiskinan bersifat multidimensi dan karena kemiskinan bersumber dari aneka kondisi. Konstitusi Negara Indonesia (UUD 45) dengan jelas menyebutkan bahwa Negara Wajib “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Secara khusus tertuang dalam landasan kebijakan UUD 45 antara lain:

1. Pasal 27 ayat 2: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
2. Pasal 28 H Ayat 1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
3. Pasal 28 H Ayat 2: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

4. Pasal 28 H Ayat 3:“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”
5. Pasal 28 H Ayat 4:“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun
6. Pasal 31 ayat 1:“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
7. Pasal 33 Ayat 1:“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
8. Pasal 33 Ayat 2:“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”
9. Pasal 33 Ayat 3:“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat”
10. Pasal 33 Ayat 4:“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”
11. Pasal 34: Ayat 1:“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”
12. Ayat 2:”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
13. Ayat 3:”Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum”.

Garis kemiskinan Indonesia menurut World Bank (2014) menghitung pengeluaran kebutuhan pangan mendasar yang setara dengan 2100 kkal per hari dan kebutuhan pokok bukan pangan. Besarnya berbeda di tiap daerah, dan rata-rata tertimbang garis kemiskinan nasional tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.080.000 per bulan untuk 4 keluarga. Menurut BPS (2015) bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Suatu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah GK. Oleh karena itu, nilai GK berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada suatu waktu. Selama periode 2013- 2015, Garis

Yunus, 2017

**MODEL TRANSFORMASI MUSTAHIK KE MUZAKI DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN ANGGOTA MISYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DI DAARUT TAUHIID BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kemiskinan Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2013 Rp 271.626,- menjadi Rp 330.776,- di tahun 2015.

Upaya penanggulangan kemiskinan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proopenas ditempuh melalui dua strategi utama. *Pertama*, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. *Kedua*, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Hatmadji (2004) mengungkapkan, sesungguhnya dimensi kemiskinan yang memadai dan sesuai perkembangannya harus mencakup berbagai dimensi, tidak hanya berurusan dengan pemenuhan atau kesejahteraan materi semata (*material well-being*), namun juga terkait erat dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*).

*The World Development Report* menjabarkan masyarakat miskin sebagai orang-orang yang hidup tanpa kebebasan mendasar untuk bertindak dan memilih yang oleh orang-orang kaya diterima apa adanya. Mereka seringkali tidak memiliki makanan dan tempat tinggal yang layak, pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, kondisi kekurangan yang membuat mereka tidak bisa menjalani kehidupan sebagaimana orang lain yang berada. Mereka juga sangat rentan terhadap penyakit, keterpurukan ekonomi, dan bencana alam. Dan mereka seringkali menerima perlakuan tidak adil dari institusi negara dan masyarakat serta tidak berdaya untuk mempengaruhi berbagai keputusan penting yang berdampak terhadap kehidupan mereka (The World Bank Development Report, 2000/2001).

Fenomena kemiskinan juga dapat dilihat dari hubungan kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab-akibat terjadinya suatu kejadian. Heryaldi dan Yusuf (2013) yang menjelaskan bahwa “masalah terpenting di Indonesia berkenaan dengan angka pengangguran dan rendahnya daya serap lapangan kerja yang resmi, kemampuan menyerap hampir 60% tenaga kerja dengan pendapatan masih dibawah jam kerja normal”. Sejalan dengan pendapat tersebut, Data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2015 menjelaskan bahwa :

Yunus, 2017

**MODEL TRANSFORMASI MUSTAHIK KE MUZAKI DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN  
ANGGOTA MISYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT)  
DI DAARUT TAUHIID BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).
2. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015.
3. Selama periode September 2014–Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015).
4. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2015 tercatat sebesar 73,23 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2014 yaitu sebesar 73,47 persen.
5. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, tahu, dan kopi. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.
6. Pada periode September 2014–Maret 2015, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami kenaikan.  
(www.bps.go.id)

Berdasarkan data tersebut diatas, ada tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan, antara lain: Kemiskinan masih dianggap sebagai fenomena single dimension, yakni persoalan pendapatan (*income*), padahal kemiskinan merupakan fenomena multidimensi (*integrate poverty*) yang pada hakekatnya meliputi kerentanan, kelemahan jasmani, tingkat isolasi, dan ketidakberdayaan. Kedua, yaitu anggapan bahwa lingkaran kemiskinan sebagai kawasan yang berdiri sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan lingkara kemewahan. Ketiga, adalah kesalahan dalam menentukan prioritas pembagunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan produktivitas dan kreativitas masyarakat ekonomi rendah.

Sejalan dengan pemapara diatas, Data BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2015 terkait dengan Kemiskinan menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di

Yunus, 2017

**MODEL TRANSFORMASI MUSTAHIK KE MUZAKI DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN ANGGOTA MISYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DI DAARUT TAUHIID BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

jawabarat pada bulan september 2015 sebesar 4.485.654 orang (9,57%). Mengalami kenaikan sebesar 49.995 orang (1,13%) dibandingkan kondisi pada bulan maret 2015 sebesar 4.435.699 orang (9,53%). Dalam kurun waktu enam bulan terakhir persentase penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan turun sebesar -0,21 persen poin (11,82% menjadi 8,58%). Secara absolut selama periode Maret 2015 – September 2015, penduduk miskin di perdesaan berkurang 18.182 orang (dari 1.797.316 orang menjadi 1.779.134 orang) sementara di perkotaan bertambah sebanyak 68.137 orang (dari 2.638.383 orang menjadi 2.706.520 orang). Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan bulan september 2015 terhadap penduduk miskin di Jawa Barat adalah sebesar 39,66%. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan maret 2015 (40,52%). Persentase penduduk miskin di perkotaan bulan september 2015 terhadap penduduk miskin Jawa Barat sebesar 60,34%, ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Maret 2015 (59,48%).

Tabel 1.1  
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  
Di Provinsi Jawa Barat Menurut Daerah Maret 2015 – September 2015

| Daerah/Tahun            | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) |               |         | Jumlah Penduduk Miskin | Persentase Penduduk Miskin (%) |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------|------------------------|--------------------------------|
|                         | Makanan                            | Bukan Makanan | Total   |                        |                                |
| [1]                     | [2]                                | [3]           | [4]     | [5]                    | [6]                            |
| <b>Perkotaan</b>        |                                    |               |         |                        |                                |
| Maret 2015              | 213.479                            | 94.009        | 307.487 | 2.638.383              | 8,43                           |
| September 2015          | 223.843                            | 94.454        | 318.297 | 2.706.520              | 8,58                           |
| <b>Perdesaan</b>        |                                    |               |         |                        |                                |
| Maret 2015              | 231.259                            | 74.358        | 305.618 | 1.797.316              | 11,82                          |
| September 2015          | 241.132                            | 78.096        | 319.228 | 1.779.134              | 11,61                          |
| <b>Perkotaan + Desa</b> |                                    |               |         |                        |                                |
| Maret 2015              | 219.290                            | 87.586        | 306.876 | 4.435.699              | 9,53                           |
| September 2015          | 229.494                            | 89.107        | 318.602 | 4.485.654              | 9,57                           |

Sumber : Susenas 2015

Upaya untuk menekan angka kemiskinan tersebut, pemerintah telah banyak berkontribusi dalam mengentaska kemiskinan, mulai dari menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, menyusun program ekonomi pro rakyat, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan) dan membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Yunus, 2017

**MODEL TRANSFORMASI MUSTAHIK KE MUZAKI DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN ANGGOTA MISKIN (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DI DAARUT TAUHIID BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Namun, upaya tersebut tidak semata-mata berdiri sendiri melainkan dukungan di sektor akar rumput (*grass root*) pun sangatlah penting. Pendekatan pengentasan kemiskinan secara terpusat, di evaluasi lebih kepada kontribusi peranan dan konsultasi publik dengan pemerintah, Universitas, LSM, organisasi donor, pelaku ekonomi, dan masyarakat miskin (Andrianto, 2006). Artinya saat ini, peran pengentasan kemiskinan tidak dilakukan oleh Pemerintah saja melainkan komprehensif bersama dengan penggerak pemberdayaan masyarakat. Pendekatan terpusat (*Top-Down*) tidak lagi menjadi prioritas saat ini, karena masyarakat miskin sesungguhnya memiliki potensi dan partisipasi, sehingga masyarakat miskin tidak dipandang sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan dalam menjawab masalah mereka sendiri sekaligus berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan (Andrianto, 2006). Maka pendekatan bottom-up sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lebih diperlukan dalam membentuk masyarakat mandiri, sejalan dengan itu Kamil, M (2009: 59), bahwa *output/ impact* dari proses pemberdayaan adalah “menciptakan masyarakat yang responsif, terampil, dan kolaboratif untuk meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat. Sama halnya menurut Kindervater (dalam kamil 2009:63) yang mengartikan “pemberdayaan sebagai orang yang memperoleh pemahaman dan kontrol atas kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik untuk meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat.

Atas dasar itulah, banyak pula program-program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh *Nonformal Organization* atau Lembaga Swasta lainnya. Diantara sekian banyak *Nonformal Organization* atau Lembaga Swasta yang menginisiasi program-program pemberdayaan masyarakat adalah Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Kota Bandung. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) merupakan lembaga yang berada di bawah tubuh organisasi Yayasan Daarut Tauhiid sendiri.

Program unggulan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) dalam menekan angka kemiskinan adalah melalui program MiSykat (Microfinance Syariah berbasis Masyarakat), yaitu program pemberdayaan

ekonomi produktif berbasis da'wah. Program tersebut memiliki pandangan bahwa: a) kaum miskin memiliki keahlian yang tidak digunakan atau hanya sedikit digunakan, sehingga kurang mendapatkan kesempatan dan memerlukan akses modal. b) Kemiskinan tidak diciptakan oleh kaum miskin, tetapi oleh kebijakan dan lembaga yang mengecualikan mereka dari kesempatan, sehingga kaum miskin memerlukan aset. c) Kegiatan amal (sosial) bukan merupakan solusi terhadap kemiskinan, hal itu menciptakan ketergantungan/ mengekalkan kondisi kemiskinan mereka daripada kemandirian. d) Menjadi wirausaha adalah cara cepat dan mudah untuk menciptakan lapangan kerja bagi kaum miskin, sehingga perlunya pemberian modal usaha dapat menciptakan wirausaha secara cepat. e) Kaum wanita memiliki kecenderungan tinggi untuk jatuh ke dalam kemiskinan dan yang paling menderita karenanya, tetapi mereka memiliki dampak langsung bagi keluarga, sehingga mayoritas program ini adalah perempuan. Sejalan pula dengan terjemahan Sunan Abu Dawud oleh Hassan (Buku 9, Nomor 1637), disuratkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberdayakan masyarakat miskin dengan mendorong mereka bekerja, Hal ini tersurat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dengan demikian, akses kredit sangat penting dalam usaha untuk meningkatkan kewirausahaan dan kemandirian kerja, baik pria maupun wanita, di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dijelaskan pula menurut Suyono (dalam Marzuki. M. S, 2010, hlm. 88) :

Pengembangan dan pemberdayaan manusia adalah proses pengembangan manusia agar memiliki kapasitas penuh, memiliki pilihan-pilihan yang lebih luas dan kesempatan yang lebih besar sehingga mereka dapat mencapai kehidupan yang lebih bermartabat dan lebih makmur.

Pendekatan program *microfinance* oleh MiSykat dengan lembaga *microfinance* perbankan lainnya memiliki perbedaan yang mendasar, terutama dalam membuka wawasan masyarakat melalui pendekatan Dakwah serta pengelolaan program berdasarkan nilai-nilai agama islam. Tujuan akhir yang dikembangkan dalam program MiSykat adalah memandirikan masyarakat, yaitu dari Mustahik ke Muzaki. Pada umumnya konsep Mustahik ke Muzaki menyoroti sistem ekonomi dan sosial zakat atau ditinjau dari kelembagaan zakat, seperti

Yunus, 2017

**MODEL TRANSFORMASI MUSTAHIK KE MUZAKI DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN ANGGOTA MISYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DI DAARUT TAUHIID BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pada penelitian yang dilakukan Owolabi dan Derus (2013) terhadap lembaga Zakat di Malaysia, menunjukkan bahwa :

Peran dan fungsi lembaga zakat perlu didorong agar membawa perubahan pada paradigma berfikir tentang fungsi dan peran zakat bagi masyarakat. lembaga tidak hanya sebagai pengumpul dan distributor zakat. Lembaga Zakat seyogyanya memiliki konsep mengenai zakat yang sesuai dengan konsep zakat itu sendiri yaitu peningkatan serta pertumbuhan. Zakat tidak hanya berfungsi ekonomi namun dapat disadari sebagai tatanan nilai yang melandasi perilaku para mustahik.

Hasil penelitian Sarea (2012) menunjukkan bahwa zakat implementasi mendorong perekonomian serta memperkecil kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, seperti dinyatakan:

*“In other words, the commitments of Muslims to pay Zakat to the eight categories to achieve sustainable development in terms of redistribution of wealth between Muslims as well as bridging the gap between the rich and the poor in the society. This paper also contributes to consider Zakat as a proper index to measure economic growth through a number of methods to evaluate the economic growth.*

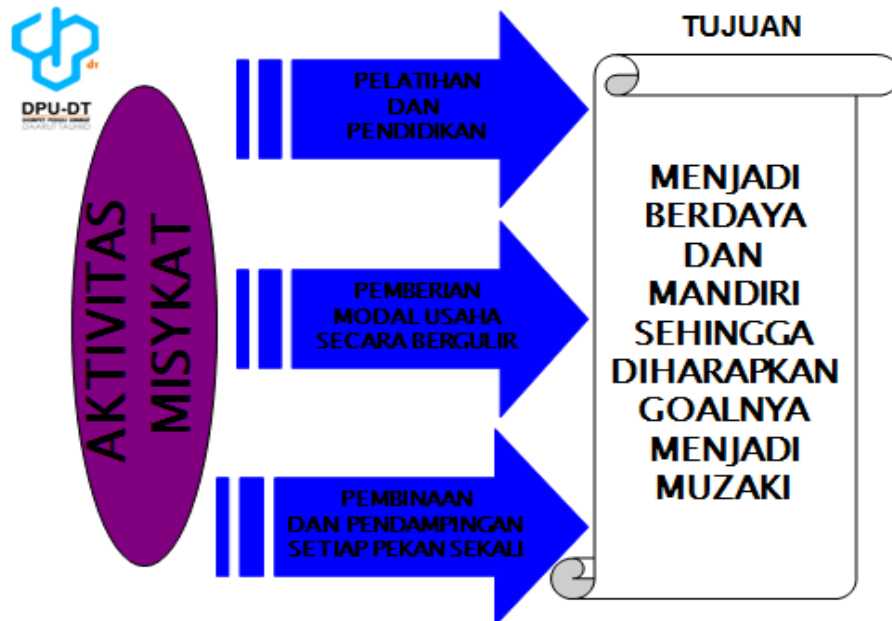
Penelitian diatas masih menjelaskan bahwa sasaran zakat adalah mustahik serta zakat sebagai penyokong sistem sosial dan ekonomi, namun belum dikaji bagaimana proses mustahik agar mejadi muzaki sebagai sebuah bentuk kesadaran terhadap realitas sosial serta identitasnya sebagai muslim. Hasil penelitian Sarea masih bersifat makro, belum secara mendalam bagaimana proses zakat terjadi pada level individu. Sedangkan hasil penelitian Javed lebih mengetengahkan zakat sebagai sistem ekonomi dan sosial.

Artinya, masih perlu mengkaji dari aspek lainnya yaitu proses pembentukan karakter atau perilaku yang tercipta melalui pendekatan agama dan dakwah dalam menumbuhkan kesadaran yang terkandung dalam program Microfinance Syariah sebagai upaya pemberdayaan para mustahik agar menjadi muzaki. Proses transofrmasi tersebut dilakukan melalui program yang sistematis dan terorganisir, dimulai dari pendidikan dan pelatihan, pemberian modal usaha secara bergulir dan melakukan pembinaan serta pendampingan terjadwal. Seperti tersajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1



## Aktivitas MiSykat DT



Sumber : DPU-DT, 2015

Perlu diketahui pula, bahwa program Microfinance berbasis masyarakat memiliki sumber permodalan dari anggota MiSykat dan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Bandung. Mustahik yang menjadi sasaran program MiSykat DT, di organisir kedalam kelompok (*majelis*) yang dilatih secara terprogram dan berkelanjutan, dalam rangka menumbuhkembangkan *Human Resource Development* (HRD) atau pengembangan sumber daya manusia. *Human resource development* (HRD) atau manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam pengembangan organisasi, karena dalam sebuah organisasi yang di bangun dari individu yang berbeda dan untuk menyatukanya perlu adanya manajemen untuk menggali potensi yang ada pada individu dalam organisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Chalofsky (J.P Wilson 2001:10) mengemukakan bahwa:

Pengembangan sumber daya manusia adalah studi dan praktek meningkatkan kemampuan belajar individu, kelompok, kolektif, dan organisasi melalui pengembangan dan penerapan pembelajaran berbasis intervensi yang untuk tujuan mengoptimalkan pertumbuhan dan efektivitas manusia dan organisasi.

Yunus, 2017

**MODEL TRANSFORMASI MUSTAHIK KE MUZAKI DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN ANGGOTA MISYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DI DAARUT TAUHIID BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Begitu pula menurut pendapat McLagan dan Suhadolnik ( J.P Wilson 2001:10) juga mengemukakan bahwa HRD yakni pemanfaatan yang terintegrasi dari pelatihan dan pengembangan karir serta pengembangan organisasi untuk meningkatkan efektivitas individu dan organisasi.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka hingga saat ini belum ada penelitian yang mengetengahkan proses transformasi Mustahik ke Muzaki melalui program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat dengan pendekatan Dakwah. Penelitian ini akan mengkonstruksi model transformative sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi lembaga pemberdayaan masyarakat berbasis keuangan syariah dalam upaya mendorong perubahan. Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan tidak cukup mendorong perubahan, interaksi sosial yang berlangsung tidak cukup memberikan kesempatan untuk berdialog karena rendahnya kesadaran terhadap dialog dan refleksi bersama. Adanya model yang dapat dikonstruksi dapat dijadikan sebagai *Guidence* bagi para mustahik untuk menjadi muzaki. Konstruksi tersebut didasarkan pada upaya membangun kesadaran terhadap pentingnya pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kesadaran sebagai muslim yang harus berdaya dan menjadi muzaki berdasarkan penalaran dan keimanan. Implementasi penelitian ini dilakukan pada program MiSykat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandung dengan tujuan untuk merumuskan kontruksi model transformasi Mustahik ke Muzaki dalam meningkatkan keberdayaan anggota MiSykat (microfinance syariah berbasis masyarakat) di Darut Tauhiid Bandung.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Kemiskinan pada hakekatnya disebabkan oleh tiga hal yang saling berkaitan yaitu, pertama; terbatasnya modal dan sumber daya untuk kesejahteraan seperti pekerjaan, lahan pertanian sebagai sumber ekonomi. Kedua; hambatan dalam diri sendiri dan lingkungan seperti pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. *Ketiga*; hambatan sosial budaya seperti diskriminasi, marjinalisasi (Sudjana, 2000, hlm. 259). Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan sumber

Yunus, 2017

**MODEL TRANSFORMASI MUSTAHIK KE MUZAKI DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN ANGGOTA MISYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DI DAARUT TAUHIID BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang sesuai dan mendorong transformasi yang dilandasi oleh kesadaran kritis. Peningkatan SDM dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi warga masyarakat miskin, karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya maka dapat melakukan usaha-usaha (berwirausaha) guna memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan perilaku terjadi karena adanya kesadaran berperilaku yang dilandasi oleh logika dan keimanan serta kenyataan empiris. Proses pemberian modal melalui microfinance syariah, merupakan upaya untuk memberikan modal awal dalam membentuk kewirausahaan, tanggungjawab yang diberikan kepada majelis dalam mengelola keuangan.

Sebagian besar para penerima modal (mustahik) microfinance syariah kurang berdaya, memiliki pengetahuan yang lebih rendah tentang kewirausahaan. Para mustahik terbiasa dengan disiplin yang kurang, kesadaran perilaku yang lemah sebagai seorang muslim yang memiliki sumber daya (*self awarnes*), kurang percaya diri, atau memiliki pemahaman yang keliru mengenai nasib dan perubahannya dan memiliki keyakinan. Karakteristik individu dan lemahnya program pelatihan dan pendidikan serta fasilitasi untuk merubah para mustahik menjadi muzaki turut menghambat perubahan itu sendiri. Konsep pendidikan yang kurang dilandasi oleh azas *life long learning* dan menempatkan para anggota MiSykat sebagai pembelajar dewasa turut mempengaruhi keberhasilan perubahan tersebut. Refleksi pengalaman secara kritis, dialog, interaksi dan pembelajaran sosial seharusnya menjadi isu-isu penting yang perlu dibahas terkait dengan perubahan perilaku. Dialog seyogyanya berisi pembahasan kritis mengenai kata-kata generatif dalam lingkungan para mustahik misalnya ”tangan diatas lebih baik dari tangan di bawah”. Harga diri sebagai muslim serta bagaimana kehidupan sosial antar muslim seharusnya dalam konteks pemberdayaan dan sistem ekonomi.

Karakteristik diri, pendidikan dan pelatihan, fasilitasi serta interaksi dan komunikasi dalam kehidupan sosialnya mempengaruhi bagaimana perubahan dari mustahik ke muzaki. Sampai saat ini, Darut Tauhiid Bandung memiliki program

Yunus, 2017

**MODEL TRANSFORMASI MUSTAHIK KE MUZAKI DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN  
ANGGOTA MISYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT)  
DI DAARUT TAUHIID BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

MisYkat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberian modal bergulir berbasis syariah yang dibarengi pula dengan proses *training* dan *edukasi* dengan sasaran para mustahik agar menjadi masyarakat yang mandiri (muzaki). Untuk itulah, program tersebut perlu diangkat menjadi model konstruksi agar menjadi prototipe program Microfinance berbasis masyarakat, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat agar mustahik menjadi muzaki.

## 2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana model transformasi mustahik ke muzaki sehingga dapat meningkatkan keberdayaan anggota MiSykat di Darut Tauhiid?

Berdasarkan masalah utama penelitian itu dapat dirumuskan menjadi lima perumusan masalah khusus, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan program MiSykat dalam meningkatkan keberdayaan anggota MiSykat di Daarut Tauhiid?
- b. Bagaimana keberdayaan anggota program MiSykat di Daarut Tauhiid?
- c. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat penyelenggaraan program MiSykat di Daarut Tauhiid ?
- d. Bagaimana kontruksi model transformasi mustahik ke Muzaki dapat meningkatkan keberdayaan anggota MiSykat di Darut Tauhid?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian menguraikan dan membahas tentang pokok masalah yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, ada beberapa tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian, antara lain:

1. Menggambarkan pengelolaan program MiSykat dalam meningkatkan keberdayaan anggota MiSykat di Daarut Tauhiid
2. Menggambarkan keberdayaan anggota program MiSykat di Daarut Tauhiid
3. Menggambarkan faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat penyelenggaraan program MiSykat di Daarut Tauhid

4. Menggambarkan kontruksi model transformasi mustahik ke Muzaki dapat meningkatkan keberdayaan anggota MiSykat di Darut Tauhid

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, secara teoritis untuk (1) Mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, humaniora dan teknologi, khususnya ilmu pendidikan luar sekolah, mengembangkan konsep dan prinsip ilmu pengetahuan tentang pendidikan luar sekolah terkait dengan perubahan perilaku dari mustahik ke muzaki, (2) mengembangkan konsep dan prinsip kepelatihan dalam pendidikan luar sekolah terutama tentang aspek materi, proses, instruktur dan evaluasi yang semuanya terkait dengan kebutuhan masyarakat, sehingga memberikan berbagai alternatif metode pembelajaran dalam kepelatihan tentang perubahan dari mustahik ke muzaki, (3) mengembangkan konsep dan prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dengan lebih tertata lagi urutannya dalam penyelenggaraan pelatihan untuk mendorong perubahan dari mustahik ke muzaki, (4) mengembangkan konsep dan prinsip dasar kewirausahaan pada kelompok mustahik,

Secara praktis, (1) pemerintah selama ini menghadapi kesulitan besar dalam menangani kemiskinan yang terus meningkat baik di desa maupun di perkotaan. Pemerintah dan Lembaga pengumpul zakat terus berusaha untuk memberdayakan mereka, tetapi usaha itu belum memberikan hasil yang maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan atau jumlah mustahik. Berbagai program dalam upaya pemberdayaan untuk menumbuhkan kemandirian kelompok masyarakat ekonomi lemah atau miskin. Banyak kendala yang dihadapi, seperti tempat berusaha bagi mereka, tempat tinggal, kurangnya alokasi dana dari pemerintah, kemampuan berusaha yang masih minim, cara meminjam permodalan untuk usaha, karakter orang miskin atau mustahik yang menganggap kemiskinan adalah nasib mereka, keterbatasan ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi keluarga yang memprihatikan sehingga sulit untuk diberdayakan. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam menyusun program untuk mendorong perubahan mustahik menjadi muzaki. (2) Terbentuknya model kontruksi

Yunus, 2017

**MODEL TRANSFORMASI MUSTAHIK KE MUZAKI DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN  
ANGGOTA MISHYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT)  
DI DAARUT TAUHIID BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

transformasi perubahan mustahik menjadi muzaki melalui penelitian, mempunyai manfaat bagi upaya mempercepat kemandirian dan meningkatkan mutu pemberdayaan mustahik, yang minim pengetahuan serta perubahan dari mustahik ke muzaki. (3) Tergambarkannya perubahan muzaki menjadi mustahik menekankan pemberdayaan mustahik sebagai basis dari upaya pengurangan kemiskinan yang besar di tanah air. Dengan harapan, konstruksi model menjadi landasan bagi pengembangan pelatihan untuk merubah mustahik menjadi muzaki.

#### **E. Struktur Organisasi Disertasi**

Dalam penyusunan disertasi ini peneliti mengurutkan sistematika penulisan yang terdiri atas :

BAB I, Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi disertasi.

BAB II, Landasan Teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian diantaranya: 1) Pendidikan Luar Sekolah sebagai Pendidikan Kritis, 2) Hakekat Pembelajaran Transformatif, 3) Pendidikan bagi Orang Dewasa, 4) Pemberdayaan Masyarakat, 4) Penelitian Relevan, 5) Kerangka Pemikiran.

BAB III, Metode Penelitian, membahas beberapa komponen diantaranya: Desain Penelitian, Partisipan dan Tempat Penelitian, Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV, Temuan dan Pembahasan hasil penelitian yang bertujuan untuk: (1) Menggambarkan pengelolaan program MiSykat dalam meningkatkan keberdayaan anggota MiSykat di Daarut Tauhiid. (2) Menggambarkan keberdayaan anggota program MiSykat di Daarut Tauhiid. (3) Menggambarkan faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat penyelenggaraan program MiSykat di Daarut Tauhiid. (4) Menggambarkan kontruksi model transformasi mustahik ke Muzaki dapat meningkatkan keberdayaan anggota MiSykat di Darut Tauhid.

BAB V, Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi yang menyajikan penafsiran terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus memberikan saran dan masukan yang dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi dari penelitian.

Yunus, 2017

**MODEL TRANSFORMASI MUSTAHIK KE MUZAKI DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN  
ANGGOTA MISYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT)  
DI DAARUT TAUHIID BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)